
PENGARUH ANGGARAN BERBASIS KINERJA, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, DAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENILAIAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (STUDI PEMERINTAHAN DI KOTA DUMAI)

Sem Paulus Silalahi

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah di Dumai.

Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode survey dengan bantuan instrumen penelitian berupa kuestioner yang berjumlah 60 lembar yang disebarlangsung pada 33 satuan kerja perangkat daerah yang ada di Dumai yang ditujukan langsung kepada kepala satuan kerja dan kepala bagian yang bekerja pada satuan kerja perangkat daerah tersebut. Data pada penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 17.0. Untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian digunakan korelasi Pearson dan Cronvach Alpha. Disamping itu juga dilakukan pengujian normalisasi data dengan menggunakan normal probability plot.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah.

PENDAHULUAN

Dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja maka setiap pemerintah daerah akan diketahui kinerjanya. Kinerja ini akan tercermin pada laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan prestasi kerja satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). Penyusunan APBD berbasis prestasi atau kinerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar blanja, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah daerah dituntut lebih responsif, transparan, dan akuntabel terhadap kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2006).

Pemerintah Kota Dumai telah membangun dan mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang berbasis komputer yang disebut dengan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah atau disebut juga Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah sejak tahun 2009. Dari aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ini, setiap pimpinan SKPD dapat memperoleh data dengan cepat berupa berapa besar persentase penyerapan dana masing-masing kegiatan pada masing-masing SKPD dari waktu ke waktu. Dari aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah ini diperoleh informasi penyerapan dana secara keseluruhan untuk Pemerintah Kota Dumai.

Anggaran

Secara umum anggaran dapat diartikan sebagai suatu perkiraan atau estimasi atas penerimaan yang akan diterima dan pengeluaran yang akan dilakukan untuk melayani aktivitas yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang. Anggaran menurut Bastian (2006) dapat diinterpretasikan sebagai paket pertanyaan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode yang akan datang.

Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran Berbasis Kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat terhadap Visi, Misi dan Rencana Strategis organisasi. Anggaran Berbasis Kinerja mengalokasikan sumberdaya pada program bukan pada unit organisasi semata dan memakai *output measurement* sebagai indikator kinerja organisasi (Bastian, 2006).

Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan program anggaran dimulai dengan perumusan dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut.

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output*) dan perencanaan alokasi biaya (*input*) yang ditetapkan.
2. *Output* (keluaran) menunjukkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan (*input*) yang digunakan.
3. *Input* (masukan) adalah besarnya sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan sesuai dengan masukan (*input*) yang digunakan.
4. Kinerja ditunjukkan oleh hubungan antara *input* (masukan) dengan *output* (keluaran).

Prinsip-Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja perlu diperhatikan prinsip-prinsip penganggaran, aktivitas utama dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, peranan legislatif, siklus perencanaan anggaran daerah, struktur APBD, dan penggunaan ASB. Dalam hal ini prinsip-prinsip anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Transparansi dan akuntabilitas anggaran**
Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.
- b. **Disiplin anggaran**
Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum/tidak tersedia anggarannya.

-
- c. Keadilan anggaran
Perguruan tinggi wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok sivitas akademika dan karyawan tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan, karena pendapatan perguruan tinggi pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan.
- d. Efisiensi dan efektivitas anggaran
Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan *stakeholders*.
- e. Disusun dengan pendekatan kinerja
Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau *input* yang telah ditetapkan.

Tahap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Berdasarkan Pasal 7 PP Nomor 21 Tahun 2004 kementerian Negara/ lembaga diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu pada indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Oleh karena itu, suatu anggaran yang akan didisain dan disusun harus mampu menjadi panduan yang baik bagi pelaksanaan aktivitas yang akan dilakukan oleh organisasi sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja harus melalui tahap penyusunan seperti yang dikemukakan oleh Nordiawan (2007:83) berikut ini :

1. Penetapan strategi organisasi (Visi dan Misi)
2. Pembuatan Tujuan
3. Penetapan Aktivitas
4. Evaluasi dan Pengambilan keputusan

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. (PP No. 58 Tahun 2005). Dalam struktur pemda, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi dilingkungan satuan kerja. Sistem akuntansi disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurut Nordiawan (2007) kegiatan akuntansi pada satuan kerja meliputi:

- a) Prosedur akuntansi penerimaan kas
- b) Prosedur akuntansi pengeluaran kas
- c) Prosedur akuntansi aset
- d) Prosedur akuntansi selain kas

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) atau dikenal juga dengan sebutan Sistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMKEUDA) merupakan sistem yang terdiri dari bermacam-macam program Penyusunan/Penganggaran APBD, Penatausahaan Keuangan, Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan. Seiring dengan penerapan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah No. 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pemandagri No. 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Pemandagri No. 59 Tahun 2007 No. 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penilaian Kinerja SKPD

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur (Pemandagri Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 1).

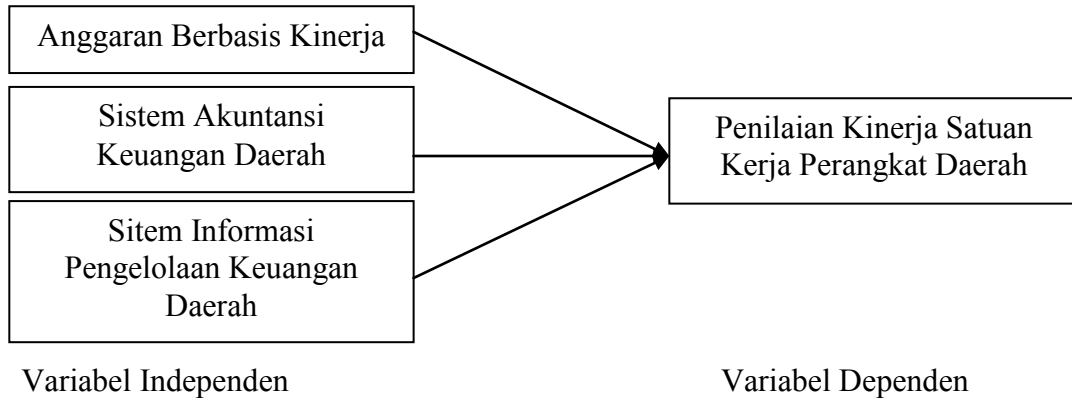
Fokus pengukuran kinerja pada awalnya adalah pengukuran tingkat efisiensi. Hal tersebut berhubungan erat dengan objek pembahasan pada awalnya yaitu pengukuran kinerja kegiatan usaha swasta. Ketika kesadaran para pengambil kebijakan muncul bahwa kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya juga dapat diukur efisiensi dan efektivitasnya, maka pembahasan yang intensif mengenai pengukuran kinerja pemerintah dimulai. Meskipun demikian, masalah muncul ketika disadari bahwa untuk pelayanan publik banyak sekali hal-hal yang bersifat kualitatif.

METODE PENELITIAN

1. Model Penelitian

Untuk lebih menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini maka berikut digambarkan variabel penelitian yang digunakan :

Gambar 2.1 Model Penelitian



2. Hipotesis Penelitian

- H1 : Anggaran Berbasis Kinerja Berpengaruh Terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- H2 : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- H3 : Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Adapun yang menjadi objek dari penelitian dalam penulisan ini adalah :

Tabel 3.1 SKPD Pemerintah Kota Dumai

NO	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah
1	Rumah Sakit Umum Daerah
2	Sekretaris Daerah
3	Sekretaris Dewan
4	Kantor Inspektorat
5	Badan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Badan Narkotika
7	Badan Kepegawaian dan Diklat
8	Badan Perencanaan dan Pembangunan
9	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Olahraga
10	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
11	Dinas Perternakan, Perikanan dan Kelautan
12	Dinas Pekerjaan Umum
13	Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan
14	Dinas Koperasi dan UKM
15	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16	Dinas Kesehatan
17	Dinas Perhubungan
18	Dinas Sosial
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
20	Dinas Pendapatan dan Pengolahan Keuangan
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22	Dinas Pendidikan
23	Kantor Pelayanan Pasar
24	Kantor Satpol PP
25	Kantor Arsip dan Perpustakaan
26	Kantor Kesatuan Bangsa
27	Kantor Lingkungan Hidup
28	Kantor Pelayanan Terpadu
29	Kecamatan Bukit Kapur
30	Kecamatan Dumai Barat
31	Kecamatan Dumai Timur
32	Kecamatan Medang Kampar
33	Kecamatan Sungai Sembilan

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh satuan kerja perangkat daerah yang berada di kota Dumai, Riau.

Adapun jumlah keseluruhan populasi adalah sebanyak 33 Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan sampel yang diambil dari tiap-tiap unit satuan kerja perangkat daerah adalah sebanyak dua orang yang menjadi tim dalam penentuan sistem yang berlaku. Jadi total keseluruhan sampel yang diambil adalah sebanyak 66 orang.

Jenis data yang ada dalam penelitian ini adalah data subjek yang menunjukkan opini, sikap, pengalaman dan karakteristik dari responden. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer.

Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu (1) metode survey, (2) metode observasi dan yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menggunakan kuesioner, dalam penelitian ini peneliti mengirimkan daftar kuesioner yang bekerja pada posisi yang berbeda-beda didalam organisasinya masing-masing. Mereka berada pada posisi : Kepala Bagian dan Kepala SKPD yang ada di Pemerintahan Kota Dumai. Kuesioner penelitian diadopsi dari kuesioner yang telah digunakan peneliti-peneliti terdahulu.

Kuesioner anggaran berbasis kinerja, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diadopsi dari Putra (2010), kuesioner ini akan menghasilkan data interval dengan skor 5 (SS=Sangat Setuju), skor 4 (S=Setuju), skor 3(N=Netral), skor 2 (TS= Tidak Setuju), skor 1(STS=Sangat Tidak Setuju).

Kuesioner sistem akuntansi keuangan daerah mengadopsi kuesioner dari Rezkina (2010), kuesioner ini menghasilkan data interval dengan skor 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=Setuju), skor 3(N=Netral), skor 2 (TS= Tidak Setuju), skor 1(STS=Sangat Tidak Setuju).

Kuesioner penilaian kinerja SKPD diadopsi dari Warisno (2009), kuesioner ini menghasilkan data interval dengan skor 5 (SS=sangat setuju), skor 4 (S=Setuju), skor 3(N=Netral), skor 2 (TS= Tidak Setuju), skor 1(STS=Sangat Tidak Setuju).

Selanjutnya berdasarkan kuesioner yang telah disusun dan dirumuskan secara matang, kuesioner disampaikan kepada masing-masing responden dengan tujuan untuk memperoleh data. Secara umum, konstruksi di dalam kuesioner diukur dengan menggunakan skala Likert yang berisi lima poin, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

Metode yang digunakan untuk menganalisa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah menggunakan regresi linear berganda. Model ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk meneliti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun model persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Analisis data dilakukan dengan bantuan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 17.00.

1. Uji Kualitas Data
 - a. Uji Validitas
 - b. Uji Reliabilitas
2. Uji Normalitas Data
3. Uji Asumsi Klasik
 - a. Uji Multikolinieritas
 - b. Uji Heteroskedastisitas
 - c. Uji Autokorelasi
4. Koefisien Determinasi
5. Pengujian Hipotesis
 - a. Uji Signifikan F (Uji F)
 - b. Uji Signifikan t (Uji t)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Total kuesioner yang dikirim adalah 66 kuesioner yang diberikan secara langsung kepada tiap-tiap responden. Total kuesioner yang diterima peneliti adalah sebanyak 62 kuesioner. Sebanyak 2 kuesioner tidak digunakan dalam analisa selanjutnya dikarenakan ada beberapa item pertanyaan yang tidak diisi secara lengkap. Dengan demikian jumlah kuesioner yang layak untuk dianalisa lebih lanjut sebanyak 60 kuesioner. Untuk lebih jelasnya rincian tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 : Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

KETERANGAN	TOTAL
Kuesioner yang dikirim	66
Kuesioner yang tidak mendapat respon	4
Kuesioner yang kembali	62
Kuesioner yang tidak dapat diolah	2
Kuesioner yang dapat diolah	60
Persentase pengembalian kuesioner (60 / 66 x 100 %)	90.90%

Sumber : Data Olahan SPSS

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah kuesioner yang tidak kembali adalah sebanyak 4 buah atau 6.06 % dari total kuesioner yang disebar. Hal ini terjadi karena kesibukan para kepala satuan kerja perangkat daerah dan kepala bagian untuk mengembalikan kuesioner tepat pada waktunya. Karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 : Informasi Demografis Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Pria	48	80%
	Wanita	12	20%
	TOTAL	60	100%
Usia Responden	30-40	30	50%
	41-50	16	26,67%
	> 51	14	23,33%
	TOTAL	60	100%
Pendidikan	D3	3	5%
	S1	45	75%
	S2	12	20%
	TOTAL	60	100%
Lama Bekerja	0-10	7	11,67%
	11-20	27	45%
	>21	26	43,33
	TOTAL	60	100%

Sumber : Data Olahan SPSS

Berdasarkan tabel 4.2 di atas diperoleh informasi bahwa responden yang paling dominan, yaitu sebanyak 50 % responden berusia antara 30 – 40 tahun, kemudian responden berusia antara 41-50 sebesar 26,67%, sedangkan sisanya 23,33% responden berusia 50 tahun ke atas. Responden pria lebih banyak 48 orang atau 80% daripada responden wanita 12 orang atau 20%. Tingkat pendidikan rata-rata responden adalah S1 (Strata-1) sebesar 75%, responden dengan tingkat pendidikan S2 (Strata-2) sebesar 20% sedangkan sisanya sebesar 5 % berpendidikan D3. Tingkat lama bekerja responden antara 11-20 tahun sebanyak 45% atau 27 orang, sedangkan untuk tingkat lama bekerja diatas >20 tahun sebanyak 26 orang atau 43,33 % dan sisanya tingkat lama bekerja antara 0-10 sebesar 11,67% atau berjumlah 7 orang.

Statistik deskriptif penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini :

**Tabel 4.3 : Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics**

Variabel	Mean	Std. Deviation	N
Penilaian Kinerja	20.3000	2.76969	60
Anggaran Berbasis Kinerja	20.7500	2.16775	60
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	20.9667	2.82223	60
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	20.0667	2.07378	60

Sumber : Data Olahan SPSS

Dari hasil statistik deskriptif variabel di atas, dapat dilihat bahwa variabel penilaian kinerja sebagai variabel dependen mempunyai nilai rata-rata (*Mean*) total jawaban responden sebesar 20.3 dan standar deviasi sebesar 2.769. Sehingga nilai rata-rata tiap jawaban untuk pertanyaan tentang Penilaian Kinerja adalah 20.3 dibagi 5 pertanyaan = 4.06 / jawaban. Sedangkan untuk variabel Anggaran Berbasis Kinerja mempunyai nilai rata-rata (*Mean*) jawaban responden sebesar 20.75 dan standar deviasi sebesar 2,167, sehingga nilai rata-rata tiap jawaban untuk tiap pertanyaan tentang Anggaran Berbasis Kinerja adalah 20.75 dibagi 5 pertanyaan = 4.15 jawaban. Sedangkan untuk variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai nilai rata-rata (*Mean*) jawaban responden sebesar 20.9667 dan standar deviasi sebesar 2.82223, sehingga nilai rata-rata tiap jawaban untuk pertanyaan tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah 20,9667 dibagi 5 pertanyaan = 4.193/jawaban. Dan untuk variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai nilai rata-rata (*Mean*) jawaban responden sebesar 20.0667 dan standar deviasi sebesar 2.07378, sehingga nilai rata-rata tiap jawaban untuk pertanyaan tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 20.0667 dibagi 5 pertanyaan = 4.01334/jawaban.

Berdasarkan data yang diperoleh telah dilakukan uji korelasi pearson dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.4 : Hasil Uji Validitas Variabel Penilaian Kinerja

Y	R Hitung	R tabel	Ket
Y1	0.522	0.300	Valid
Y2	0.561	0.300	Valid
Y3	0.779	0.300	Valid
Y4	0.481	0.300	Valid
Y5	0.360	0.300	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS

Tabel 4.5 : Hasil Uji Validitas Variabel Anggaran Berbasis Kinerja

X1	R Hitung	R tabel	Ket
X1.1	0.740	0.300	Valid
X1.2	0.727	0.300	Valid
X1.3	0.308	0.300	Valid
X1.4	0.566	0.300	Valid
X1.5	0.679	0.300	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS

Tabel 4.6 : Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

X2	R Hitung	R tabel	Ket
X2.1	0.555	0.300	Valid
X2.2	0.672	0.300	Valid
X2.3	0.733	0.300	Valid
X2.4	0.696	0.300	Valid
X2.5	0.499	0.300	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS

Tabel 4.7: Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

X3	R Hitung	R tabel	Ket
X3.1	0.477	0.300	Valid
X3.2	0.323	0.300	Valid
X3.3	0.396	0.300	Valid
X3.4	0.529	0.300	Valid
X3.5	0.422	0.300	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS

Dari hasil uji korelasi pearson, dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan dalam penelitian ini adalah valid, dengan demikian pertanyaan dalam penelitian ini layak digunakan untuk uji selanjutnya.

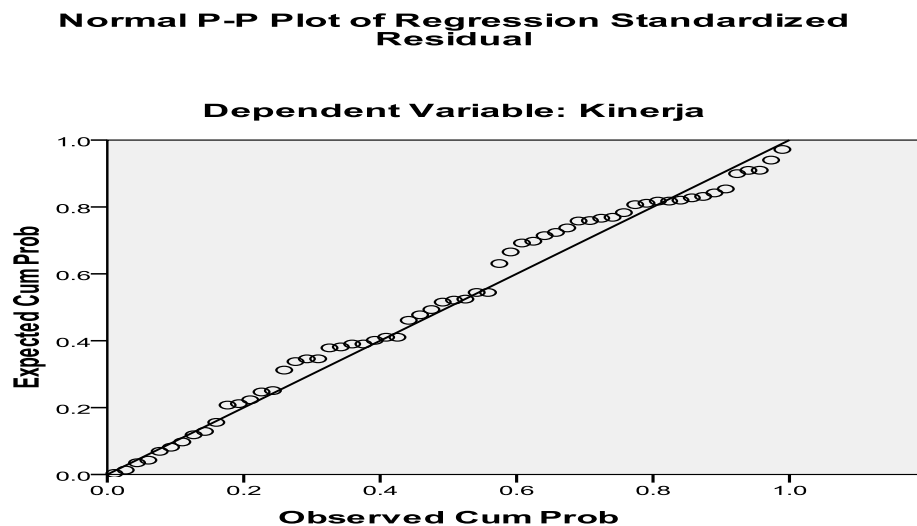
Tabel. 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
1.	Kinerja	0.757	0,600	Reliabel
2.	Anggaran Berbasis Kinerja	0.808	0,600	Reliabel
3.	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0.830	0,600	Reliabel
4.	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	0.604	0,600	Reliabel

Sumber : Data Olahan SPSS

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat, koefisien alpha untuk variabel Penilaian Kinerja (Y) sebesar 0.757 (>0.60). Anggaran berbasis kinerja (X₁) sebesar 0.808 (>0.60). Selanjutnya variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₂) memiliki koefisien alpha sebesar 0.830 (>0.60), dan variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X₃) memiliki koefisien alpha sebesar 0.604 (>0.60), sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian yang reliabel karena nilai cronbach alpa lebih besar dari nilai koefisien alpa 0.60.

Gambar 4.1 : Uji Normalitas Data



Sumber : Data Olahan SPSS

Berdasarkan gambar normal p-p plot diatas, dapat dilihat bahwa data berada di sekitar garis diagonal, jadi dapat disimpulkan bahwa data penelitian normal dan layak untuk diuji.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini :

Tabel 4.9 : Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Anggaran Berbasis Kinerja	.660	1.516
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	.675	1.482
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	.744	1.345

Sumber : Data Olahan SPSS

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai VIF untuk masing-masing variabel < 10 dan nilai toleransi > 0,10. jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari pengaruh multikolinearitas.

b. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel 4.10 di bawah :

Tabel 4.10 : Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.853 ^a	.728	.713	1.48274	1.608

a. Predictors: (Constant), X3total, X1total, X2total

b. Dependent Variable: Ytotal

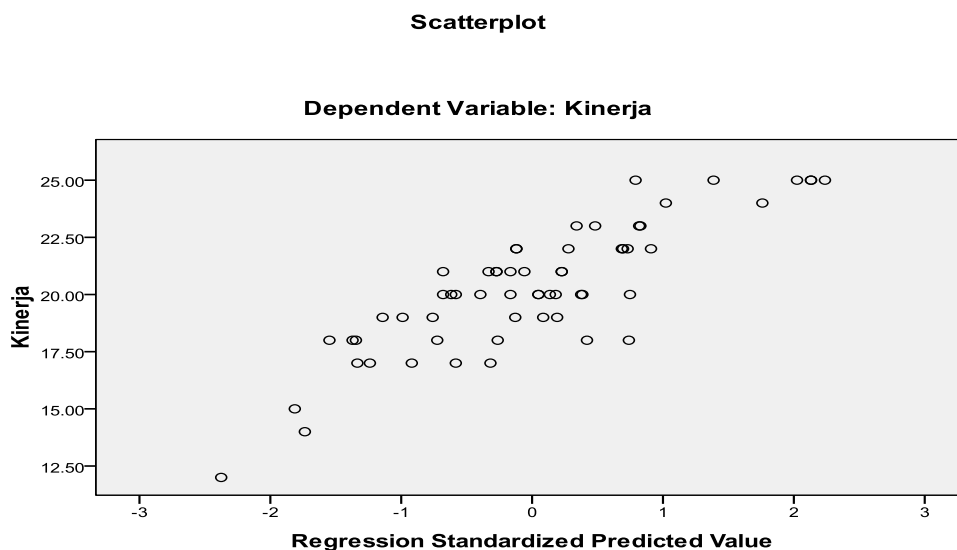
Sumber : Data Olahan SPSS

Dapat dilihat dari tabel diatas Durbin-Watson menunjukkan angka 1.608. Hal ini berarti bahwa nilai DW berada pada kisaran antara -2 dan +2, oleh Karena itu diputuskan bahwa model penelitian ini sudah bebas dari kemungkinan adanya autokorelasi. Jadi, apabila model penelitian ini bebas autokorelasi maka varians sampel akan dapat menggambarkan varians populasinya, dan model yang dihasilkan akan dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai variabel independen.

c. Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat melihat grafik scatterplot. Deteksinya dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik dimana sumbu X adalah Y menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y . Seperti terlihat pada gambar 4.2 dibawah ini :

Gambar 4.2 : Diagram Scatterplot Heterokedastisitas



Sumber : Data Olahan SPSS

Pada Gambar diatas, tidak terlihat pola yang jelas karena titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda berguna untuk menganalisis hubungan linear antara 2 variabel independen atau lebih dengan satu variabel dependen. Hasil regresi berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini :

Tabel 4.11 : Hasil Uji Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Variabel Independen	Kinerja SKD		
	Beta	t	Sig
Konstanta	6.327		
Anggaran Berbasis Kinerja	0.482	4.397	0.000
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0.252	3.028	0.004
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	0.565	5.233	0.000
R square	0,728	R = 0,853	
F Hitung	49.956		
F Sign	0,000		

Sumber : Data olahan SPSS

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi yang dihasilkan adalah :

$$Y = 6.327 + 0.482X_1 + 0.252X_2 + 0.565X_3$$

Dari persamaan regresi diatas menunjukkan koefisien regresi dari β_1 , β_2 , dan β_3 , bernilai positif. Hal ini menunjukkan variabel-variabel bebas apabila ditingkatkan maka akan menimbulkan peningkatan pada variabel terikatnya.

3. Koefisien Determinasi

Berikut adalah tabel hasil perhitungan R^2 dengan menggunakan aplikasi SPSS :

Tabel 4.12 : Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.853 ^a	.728	.713

Sumber : Data Olahan SPSS

Berdasarkan perhitungan nilai koefisien determinasi (R^2) diperoleh nilai sebesar 0.728. Hal ini menunjukkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Informasi Pengelolaan terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah di Kota Dumai dengan memberikan pengaruh sebesar 72.80% .

4. Pengujian Hipotesis

a) Uji Simultan (Uji F)

Dari hasil diatas dapat diperoleh $F_{test} 49.956 > F_{tabel} 3,15$ dan $P Value$ sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$. Hal ini berarti variabel independen secara bersama-sama mempunyai hubungan dengan variabel dependen. Artinya variabel Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Informasi Pengelolaan berpengaruh terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah di Kota Dumai.

Dalam pengujian hipotesis ini akan menguji apakah hasil-hasil hipotesis yang telah dibahas sebelumnya berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Hasil pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yang mana variabel-variabel tersebut adalah Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai variabel dependen.

b) Uji Parsial (Uji t)

Berikut hasil penelitian dengan menggunakan uji t :

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

Hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) dapat dilihat dari tabel 4.13 sebagai berikut :

Tabel 4.13 : Hasil Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

Berdasarkan Uji t		Berdasarkan Signifikasi		Hasil H1 Diterima / Ditolak
t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	α	
4.397	1.671	0.000	0.05	Diterima

Sumber : Data Olahan SPSS

Berdasarkan kriteria hasil pengujian ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan nilai uji t
 - Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H1 diterima dan H0 ditolak
 - Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H0 diterima dan H1 ditolak
- 2) Berdasarkan nilai signifikansi
 - Jika signifikansi (sig) $< \alpha$ (0.05), maka H1 diterima dan H0 ditolak
 - Jika signifikansi (sig) $< \alpha$ (0.05), maka H1 diterima dan H0 ditolak

Pada tabel 4.13 di atas hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) memperlihatkan bahwa t_{hitung} (4.397) $>$ t_{tabel} (1.671) dan signifikansi (0.000) $<$ alpha ($\alpha=0.05$), sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) diterima.

Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) dapat dilihat dari tabel 4.14 sebagai berikut :

Tabel 4.14 : Hasil Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

Berdasarkan Uji t		Berdasarkan Signifikansi		Hasil H1 Diterima / Ditolak
t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	α	
3.028	1.671	0.004	0.05	Diterima

Sumber : Hasil Data Olahan SPSS

Berdasarkan kriteria hasil pengujian ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan nilai uji t
 - Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H1 diterima dan H0 ditolak
 - Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H0 diterima dan H1 ditolak
- 2) Berdasarkan nilai signifikansi
 - Jika signifikansi (sig) $< \alpha$ (0.05), maka H1 diterima dan H0 ditolak
 - Jika signifikansi (sig) $< \alpha$ (0.05), maka H1 diterima dan H0 ditolak

Pada tabel 4.14 di atas hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) memperlihatkan bahwa t_{hitung} (3.028) $>$ t_{tabel} (1.671) dan signifikansi (0.004) $<$ alpha ($\alpha=0.05$), sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) diterima.

Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (H₃)

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H₃) dapat dilihat dari tabel 4.15 sebagai berikut :

Tabel 4.15 : Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga (H₃)

Berdasarkan Uji t		Berdasarkan Signifikansi		Hasil H1 Diterima / Ditolak
t _{hitung}	t _{tabel}	Sig.	α	
5.233	1.671	0.000	0.05	Diterima

Sumber : Hasil Data Olahan SPSS

Berdasarkan kriteria hasil pengujian ini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan nilai uji t
 - Jika t_{hitung} > t_{tabel}, maka H1 diterima dan H0 ditolak
 - Jika t_{hitung} < t_{tabel}, maka H0 diterima dan H1 ditolak
- 2) Berdasarkan nilai signifikansi
 - Jika signifikansi (sig) < α (0.05), maka H1 diterima dan H0 ditolak
 - Jika signifikansi (sig) > α (0.05), maka H1 ditolak dan H0 diterima

Pada tabel 4.15 di atas hasil pengujian hipotesis ketiga (H₃) memperlihatkan bahwa t_{hitung} (5.233) > t_{tabel} (1.671) dan signifikansi (0.000) < alpha (α=0.05), sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis ketiga (H₃) diterima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kota Dumai telah menerapkan anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran di setiap SKPD yang ada. Hal ini dibuktikan dengan telah ditetapkannya dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis (RENSTRA) di setiap SKPD dan begitu juga dengan telah ditetapkannya Rencana Kerja Tahunan (RENJA) di setiap SKPD. Baik RENSTRA maupun RENJA tersebut telah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa :

1. Anggaran Berbasis Kinerja dengan t_{hitung} (4.397) > t_{tabel} (1.671) dan signifikansi (0.000) < alpha (α=0.05), sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan t_{hitung} (3.028) > t_{tabel} (1.671) dan signifikansi (0.004) < alpha ($\alpha=0.05$), sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan t_{hitung} (5.233) > t_{tabel} (1.671) dan signifikansi (0.000) < alpha ($\alpha=0.05$), sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tingginya nilai koefisien determinasi (nilai *adjusted R²*) yaitu sebesar 72.8 % menunjukkan bahwa besarnya pengaruh anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah.

KESIMPULAN

1. Dari hasil diatas dapat diperoleh F_{test} 49.956 > F_{tabel} 3,15 dan *P Value* sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti F_{hitung} > F_{tabel} . Hal ini berarti variabel independen secara bersama-sama mempunyai hubungan dengan variabel dependen. Artinya variabel Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah di Kota Dumai.
2. Variabel Anggaran Berbasis Kinerja dengan nilai t hitung sebesar 4.397 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 (lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,671. dan P_{Value} sebesar 0,000 < 0,05.), dengan demikian variabel Anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah di Kota Dumai
3. Kemudian untuk variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan nilai t hitung sebesar 3.028 dengan tingkat signifikan sebesar 0,004 (lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,671. dan P_{Value} sebesar 0,004 < 0,05.) dengan demikian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah di Kota Dumai
4. Selanjutnya untuk variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan nilai t hitung sebesar 5.233 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 (lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,671. dan P_{Value} sebesar 0,000 < 0,05.) dengan demikian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah di Kota Dumai
5. Berdasarkan perhitungan nilai koefisien determinasi (R^2) diperoleh nilai sebesar 0.728. Hal ini menunjukkan bahwa Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Penilaian Kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah di Kota Dumai dengan memberikan pengaruh sebesar 72.80% .